KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Demi Menjaga Marwah Bangsa: Permintaah Maaf dari Australia Jangan Bikin Kita jadi Lembek
Tanggal : Senin, 09 Januari 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Demi Menjaga Marwah Bangsa

Permintaan Maaf Dari Australia Jangan Bikin Kita Jadi Lembek

Permintaan maaf pihak Australia atas kasus plesetan Pancasila menjadi Pancagila oleh oknum militer mereka boleh saja diterima demi hubungan baik kedua negara. Namun, Indonesia tetap harus menunjukkan ketegasan demi menjaga marwah bangsa. Tujuannya, agar kasus pelecehan terhadap negara kita tidak diulangi lagi oleh pihak Australia.

"INDONESIA harus tegas dalam bersikap. Ini untuk memastikan bahwa Australia benar-benar berperilaku sebagai negara tetangga yang baik," tegas Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, kemarin.

Jika Indonesia lembek, kata guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu, pelecehan serupa oleh Australia berpotensi terulang kembali. Australia akan menganggap Indonesia negara yang lemah dan tak bisa apa-apa.

Sikap tegas itu, sambungnya, sudah sangat pantas dilakukan. Soalnya, Australia sudah berulang kali melecehkan Indonesia. "Masih belum hilang dari ingatan kita bagaimana mereka berani menyadap Presiden dan keluarganya," bebernya.

Meskipun demikian, Ketua ICMI ini mengingatkan, hubungan baik Indonesia dan Australia penting untuk dipertahankan. Terlebih, keduanya tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea selatan, Turki dan Australia), kumpulan negara-negara emerging powers yang ada di G-20 di luar blok G-7 dan BRICS. Hubungan ekonomi keduanya juga penting bagi pertumbuhan kedua negara.

Selain itu, ada masalah-masalah kejahatan internasional seperti human trafficking dan persoalan imigran yang hanya bisa diselesaikan dengan kerja sama yang baik. "Indonesia harus mengirim pesan yang jelas yaitu mendesak Australia menjadi negara sahabat yang saling menghormati satu sama lain," tandasnya.

Australia Kudu Tindak Pengibar Bendera OPM

Di tempat terpisah, anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusumah meminta kepolisian Australia menindak pengibar bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne, Jumat pekan lalu. Sebab, pengibaran bendera tersebut merupakan tindakan kriminal.

"Australia harus menunjukkan keseriusan mereka. Kepolisian Australia harus mengusut dan menangkap pelaku yang dengan ilegal memasuki KJRI Melbourne," tegas politisi PPP ini.

Menurut Dimyati, KJRI Melbourne merupakan wilayah ekstrateritorial yang masih menjadi bagian kedaulatan Indonesia. Karena itu, KJRI juga merupakan wilayah yang dilindungi hukum internasional.

Sebagai negara tetangga yang baik, kata Dimyati, pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di sana. "Semua pihak harus menjaga kedaulatan, harga diri dan martabat bangsa dengan kepala dingin untuk kepentingan nasional."

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar ikut mendesak otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan dan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne. Menurut politisi PKS ini, peristiwa itu merupakan pelanggaran berat yang dapat memperkeruh suasana pasca kasus plesetan Pancasila.

"Peristiwa ini memberikan pesan kepada pemerintah Indonesia, adanya upaya kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi isu Papua secara massif dan terencana. Makanya, kelompok itu harus ditindak," kata Rofi, kemarin.

Untuk pemerintah Indonesia, dia meminta ada perhatian khusus. Sebab, kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. ■ ONI/QAR